



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAENAL MUTAKIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 688873

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.245.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/40 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 108.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 17.871.297

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.541.371.297



III. HUTANG

Rp. 151.957.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.389.414.297

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.